

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007.
- _____, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006
- Bratakusumah, Deddy Supriady dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Budisetyowati, Dwi Andayani, *Hukum Otonomi Daerah Di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)*, Roda Inti Media, Jakarta, 2009.
- Chalid, Pheni, *Otonomi Daerah: Masalah, Pemberdayaan dan Konflik*, Jakarta: Kemitraan 2005.
- Gadjong, Agussalim Andi, *Pemerintahan Daerah, Kajian Politik dan Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007.
- Hidayat, Syahrul, *Otonomi Daerah, Pilkada dan Komitmen Desentralisasi Politik: Tinjauan atas tiga UU mengenai Otonomi Daerah dalam Pilkada Langsung, Demokratisasi Daerah dan Mitos Good Governance, Partnership dan Pusat Kajian Ilmu Politik Fisip UI*, Jakarta, 2005.
- Hoessein, Bhenyamin, *Perubahan Model, Pola, dan Bentuk Pemerintahan Daerah: Dari Era Orde Baru ke Era Reformasi*, Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Indonesia, Jakarta, 2009.

- Handoyo, B. Hestu Cipto, *Otonomi Daerah Titik Berat Otonomi dan Urusan Rumah Tangga Daerah. Pokok-pokok Pikiran Menuju Reformasi Hukum di Bidang Pemerintahan Daerah*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 1998
- Haris, Syamsuddin (ed.), *Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*, LIPI Press, Jakarta, 2005.
- Huda, Ni'matul, *Pengawasan Pusat terhadap Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2007.
- _____, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung, 2009.
- Ida, Laode, *Otonomi Daerah Dalam Interaksi Kritis Stakeholder*, Pusat Studi Pengembangan Kawasan, Jakarta, 2002.
- Isjwara, Fred, *Pengantar Ilmu Politik*, Binacipta, Bandung, 1974.
- Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah. Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah*, Alumni, Bandung, 2008.
- Kaloh. J, *Kepala Daerah. Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah, dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003
- Koswara, *Otonomi Daerah. Untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat*, 2001,
- Maass, Arthur, *Area and Power a Thery of Local Government*, Glencoe, Illions, 1969.

- Maddick, Henry, *Democracy, Desentralisation and development, Reprinted*, Asia Publishing House, London, 1966.
- Mahfud, Moh. MD., *Konstitusi dan Hukum Konstitusi dalam Kontroversi Isu*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- Mahfud, Moh., MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, LP3ES, Jakarta, 2006.
- Manan, Bagir, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Study Hukum FH-UII Yogyakarta, Yogyakarta, 2001.
- Muljadi, H.M. Arief, *Landasan dan Prinsip Hukum Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan RI*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005.
- Nitibaskara, Tubagus Ronny Rahman, *Paradoks Konflik dan Otonomi Daerah*, M2 Print, Jakarta, 2002.
- Piliang, Indra J. ed., *Otonomi Daerah: Evaluasi dan Proyeksi*, Yayasan Harkat Bangsa, Jakarta, 2003.
- Podger, Owen. dkk, *Beberapa Gagasan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Sakidjo, Aruan dan Bambang Poernomo. *Hukum Pidana: Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Cet. I, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1990.
- Salam, Dharma Setyawan, *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai, Dan Sumber Daya*, Djambatan, Jakarta, 2002
- Sarundajang, S.H., *Birokrasi Dalam Otonomi Daerah, Upaya Mengatasi Kegagalannya*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003.
- _____, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002.

- Sedarmayanti, *Good Governance Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Simanjutak, Marsilam, *Pandangan Negara Integralistik*, Grafiti, Jakarta, 1997.
- Situmorang, Victor M. dan Cormentya Sitanggang, *Hukum Adminstrasi Pemerintahan Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Situmorang, Sodjuangan, *Model Pembagian Urusan Pemerintahan Antara pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten, Kota*, Disertasi Universitas Indonesia, Jakarta, 2002.
- Sobari, Wawan dkk, *Inovasi Sebagai Referensi, Tiga Tahun Otonomi Daerah dan Otonomi Award*, Jawa Pos Institut of Pro-Otonomi, Surabaya, 2004
- Soehino, *Perkembangan Pemerintahan di Daerah*, Liberty, Yogyakarta, 2002.
- Soejito, Irawan, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Soemantri, Sri M., *prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Alumni, Bandung, 1987.
- Sudantoko, Djoko, *Dilema Otonomi Daerah*, Andi, Yogyakarta, 2003.
- Sunarno, Siswanto, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

- Supomo, *Pidato pada tanggal 31-5-1945 Dalam Rapat Badan Penyelidik Untuk persiapan Indonesia Merdeka*, di gedung Chuoo Sang-In Jakarta, dalam Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta, 1959.
- Stroink, F.A.M., *Pemahaman Tentang Dekonsentrasi*, (Penerjemah: H. Ateng Syafrudin), Refika Aditama, Bandung, 2006
- Syaukani, Imam dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-dasar Politik Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004
- Syaukani dkk, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007.
- Tjandra, W. Riawan, *Dinamika Peran Pemerintah Dalam Perspektif Hukum Administrasi. Analisis Kritis Terhadap Persepektif Penyelenggaraan Pemerintahan*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2004.
- Wasistiono, Sadu, *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Edisi II, STPDN, Fokus Media, Bandung, 2003.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, *Desentralisasi Dalam Tata Pemerintahan Kolonial Hindia-Belanda. Kebijakan dan Upaya Sepanjang Babak Akhir Kekuasaan Kolonial di Indonesia (1900-1940)*, Bayumedia, Malang, 2005.
- Yamin, Muhammad, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta, 1959.
- Yani, Ahmad, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, edisi revisi, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002

Disertasi, Makalah dan Naskah Referensi lainnya

GTZ-SFDM, *Naskah Akademis: Isu Kewenangan, masukan untuk penyempurnaan UU. No. 22 Tahun 1999*, Jakarta, 2002.

Hoessein, Bhenyamin, *Format Dekonsentrasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Makalah, Loka Karya Nasional Pengaturan Kedudukan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang diselenggarakan oleh MIPI dan APPSI, Jakarta, 28 Maret 2008

_____, *Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah dan Daerah Otonomi*, makalah, disajikan dalam seminar Fisip UI, Depok, 2007.

_____, *Produk Hukum Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan*, Makalah, FGD DPRD DKI Jakarta, Jakarta, 28 September 2007.

_____, et., al. *Naskah Akademik Tata Hubungan Kewenangan Pemerintahan Pusat dan Daerah*, PKPADK Fisip UI, Jakarta, 2005.

_____, *Penyempurnaan UU No. 22 Tahun 1999 Menurut Konsepsi Otonomi Daerah Hasil Amandemen 1945*, disampaikan dalam Seminar dan Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional VIII, diselenggarakan oleh BPHN Depkumham, Bali, 14 - 18 Juli 2003.

_____, *Desentralisasi, Demokrasi Dan Privatisasi Dalam Kerangka Kepemerintahan Yang Baik*, Makalah Disampaikan Pada Seminar Privatisasi BUMN: Tantangan, Harapan Dan Kenyataan, Jakarta, FH UI, 4 Juli 2002

_____, *Hubungan Penyelenggaraan Pemerintahan Pusat Dengan Pemerintahan Daerah*, Makalah, Disajikan dalam seminar di Untag, Jakarta, 1999.

_____, *Berbagai Faktor yang Mempengaruhi Besarnya Otonomi Dati II Suatu Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah dari segi Ilmu Administrasi Negara*, Desertasi, Universitas Indonesia Jakarta, 1993.

_____, *Perubahan Model, Pola, dan Bentuk Pemerintahan Daerah: Dari Era Orde Baru ke Era Reformasi*, Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Indonesia, Jakarta, 2009,

_____, *Hubungan Penyelenggaraan Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan Daerah*, Artikel Jurnal Bisnis dan Birokrasi, No. 1/Vol.I, 1999.

_____, *Membangun Visi dan Persepsi yang Sama antara Daerah dan Pusat dalam Memantapkan Otonomi Daerah*, Makalah, STIA LAN RI, Jakarta, 2003.

_____, *Evaluasi Yuridis UU 22/1999*, dalam Sudarsono Hardjosoekarto (Mantan Dirjen Otda Depdagri), *Hubungan Pusat Dan Daerah Dalam Kerangka Kebijakan Desentralisasi, Dan Otonomi Daerah*, Materi Ceramah, Jakarta, 2004.

Mawardi, Oentarto Sindung, *Kebijakan Desentralisasi Dan Otonomi Daerah: Permasalahan Dan Tantangan*, Ceramah Direktur Jenderal Otonomi Daerah Pada Acara Diskusi Kebijakan Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dalam Jangka Panjang, Jakarta, 27 Nopember 2002.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945

_____, Undang-Undang Dasar Sementara 1950

_____, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasca Amandemen)

Republik Indonesia Serikat, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1949

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Peraturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah, Lembaran Negara Nomor _____, Tambahan Lembaran Negara Nomor _____

_____, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Nomor _____ Tahun 1948, Tambahan Lembaran Negara Nomor _____

_____, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Nomor 6 Tahun 1957, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1143

_____, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Nomor _____ Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Nomor _____

_____, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Nomor 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037

_____, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839

_____, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437